



ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA KENDARI

Caesar Muslim^{1*}, Asrianti Dja'wa², Hastuti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Indonesia

*E-mail : caesar.muslim@uho.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

24 April 2023

Revised

24 April 2023

Accepted:

25 April 2023

Online available:

30 April 2023

Kata Kunci :

Kapasitas Keuangan,
Keuangan Daerah,
Pendapatan Asli
Daerah

Keywords :

Financial Capacity,
Local Finance, Local
Revenue

*Correspondence:

Name :

Caesar Muslim

E-mail:

caesar.muslim@uho.ac.id

Abstrak

Kapasitas keuangan daerah menjadi faktor penting dan harus menjadi perhatian serius dalam konteks otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas keuangan daerah Kota Kendari dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan 2014. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif melalui beberapa rasio keuangan daerah, yaitu: (1) Derajat otonomi fiskal, (2) Rasio efektivitas, dan (3) Rasio kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Kendari masih dalam kategori sangat rendah dengan rata-rata derajat otonomi fiskal sebesar 7,09%. Kemampuan pemerintah dalam menggali dan merealisasikan pendapatan asli daerah juga masih belum efektif, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 79%. Selain itu, kemandirian keuangan daerah pemerintah kota Kendari masih sangat rendah dengan rasio kemandirian sebesar 11,09% dengan pola hubungan instruktif dengan pemerintah pusat.

Abstract

Financial capacities be necessary factor and should be seriously attention in regional autonomy context. This research has aim to know the capacity of regional finance of Kendari municipality in the context of supporting the regional autonomy for fiscal years 2009 until 2014. This research was conducted by descriptive method though by some ratios of regional finance, namely: (1) Degree of fiscal autonomy, (2) Efectivity ratio, and (3) Independence ratio. The yield of study, show that regional finance capacity of Kendari government are still very low in category with average degree of fiscal autonomy 7,09%. Government ability to explore and to realize the original income of government also still not effective yet, this is indicate by average efectivity ratio 79%. Also Regional financial autonomous of Kendari municipality is very low with independence ratio as 11,09% in instructive correlational pattern with central government.

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kebijakan Otonomi Daerah UU No. 32 Tahun 2004, setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 1998). Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi menurut Abdul Halim (2004) adalah terletak pada kemampuan dan pengelolaan keuangan daerahnya. Ini berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus diupayakan seminimal mungkin.

Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Maka diharapkan daerah memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dikemukakan oleh Mujiwardhani (2008), yang mengkaji tentang Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan Daerah). Hasil yang diperoleh melalui penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Cilacap masih rendah. Besarnya hanya mencapai 12,91%. Ini menunjukkan pola hubungan instruktif, dimana pemerintah pusat peranannya lebih dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah.

Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Kendari terdiri dari 10 kecamatan dan 64 kelurahan, Kendari juga memiliki sumber pendapatan yang potensial untuk dioptimalkan pemberdayaannya. Kota Kendari memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan Pendapatan Daerah, yaitu: (1) PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Total Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari tahun 2011 sebesar Rp 62.800.000.000. Pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 71.973.000.000 atau sebesar 12,83% jika dibandingkan dengan tahun 2011. Lalu pada tahun 2013 sebesar Rp 96.527.000.000 atau meningkat 33,88% dari tahun sebelumnya, Kemudian menurun 22,95% pada tahun 2014 menjadi Rp 74.375.000.000.

Total dana perimbangan pada tahun 2011 sebesar Rp 464.241.000.000. Tahun 2012 sebesar Rp 562.952.000.000 dan Tahun 2013 sebesar Rp 651.100.000.000. Jika dipersentasekan, maka total dana perimbangan dari tahun 2011 ke tahun 2012 naik sebesar 21,26% dan kemudian pada tahun 2013 meningkat sebesar 15,66% dari total dana perimbangan tahun 2012. Tahun 2014 meningkat lagi sebesar 76,54% dari tahun 2013.

Namun Lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2014, dimana pada tahun 2012 menurun sebesar 34,33% dari tahun 2011. Kemudian tahun 2013 meningkat sebesar 52,53% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 hanya meningkat menjadi 0,70% dari tahun 2013. Penelitian ini akan menganalisis mengenai sejauh mana kapasitas keuangan daerah Kota Kendari dalam pelaksanaan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, dengan objek penelitian Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data keuangan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2009-2014. Semua data-data ini diperoleh dari: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari, Kantor Badan Pusat Statistik Kota Kendari, dan BAPPEDA Kota Kendari. Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Rasio Efektifitas PAD, serta Rasio Kemandirian.

Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Untuk melihat sejauh mana kemampuan PEMDA Kota Kendari dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya. menggunakan formula:

$$DOF = \frac{\text{Pajak} + \text{Retribusi daerah}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

Langkah pengambilan keputusan DOF dilakukan dengan menetapkan kategori sebagai berikut (Depdagri, 1991):

Skala interval DOF	
Rentang nilai (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, 1991:20

Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan PEMDA dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Abdul Halim, 2004):

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dimana, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai, mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

Rasio Kemandirian

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Kendari digunakan analisis Rasio Kemandirian dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemampuan Dan Tingkat Kemandirian Daerah Serta Pola Hubungan

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif

Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Abd. Halim, 2004

- Pola Hubungan Instruktif menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola Hubungan Konsultatif menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Partisipatif menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delegatif menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Kendari Tahun 2009-2014 (Juta Rp)

TAHUN	Pajak	Retribusi	Belanja Daerah	DOF
2009	12,180	14,614	507,202	5.28
2010	14,332	16,971	602,076	5.20
2011	31,463	23,542	684,117	8.04
2012	36,563	25,233	715,044	8.64
2013	45,570	35,936	849,332	9.60
2014	34,532	26,148	1,047,963	5.79
Rerata	29,107	23,741	734,289	7.09

Sumber: DISPENDA

Kota Kendari (diolah).

Dapat dilihat bahwa besarnya DOF Kota Kendari terendah adalah pada tahun 2010 sebesar 5,20% dan yang tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai 9,60%. Namun secara rerata, selama tahun 2009-2014 besarnya DOF Kota Kendari adalah 7,09%. Hal ini berarti kecenderungan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Kendari dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih tergolong sangat rendah (0-10%).

Rasio Efektifitas

**Rasio Efektivitas PAD Kota Kendari
Tahun 2009-2014**

Tahun	Rasio Efektifitas (%)	Keterangan
2009	95	Non Efektif
2010	97	Non Efektif
2011	68	Non Efektif
2012	86	Non Efektif
2013	102	Efektif
2014	25	Non Efektif
Rerata	79	Non Efektif

Sumber: BAPPEDA (diolah).

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio efektifitas PAD Kota Kendari dari tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009 sampai tahun 2012 rasio efektifitas PAD Kota Kendari belum sampai 100% dengan kata lain belum efektif. Namun pada tahun 2013 rasio efektifitasnya mencapai 102% (efektif), dan akhirnya pada tahun 2014 rasio efektifitasnya hanya mencapai 25% (non efektif).

Rasio Kemandirian

**Rasio Kemandirian Kota Kendari
Tahun 2009-2014**

Tahun	Rs. Kemandirian (%)	Derajat Kemampuan Keuangan	Pola Hub.
2009	8.11	Rendah Sekali	Instruktif
2010	11.33	Rendah Sekali	Instruktif
2011	13.72	Rendah Sekali	Instruktif
2012	12.78	Rendah Sekali	Instruktif
2013	14.83	Rendah Sekali	Instruktif
2014	10.61	Rendah Sekali	Instruktif
Rerata	11.90	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: BAPPEDA (diolah).

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rasio kemandirian daerah Kota Kendari tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Namun jika melihat rata-ratanya yang menunjukkan persentase dibawah 25%, ini berarti Kota Kendari memiliki kemampuan keuangan yang sangat rendah dan memiliki pola hubungan yang bersifat instruktif terhadap pemerintah pusat, dimana peranan

pemerintah pusat lebih dominan dibanding pemerintah daerah. Dengan kata lain Kota Kendari tergolong daerah yang belum mandiri dan masih sangat tergantung pada sumber dana eksternal.

Pembahasan

Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Setelah menganalisis Derajat Otonomi Fiskal Kota Kendari tahun 2009 sampai dengan 2014, dengan membandingkan antara rasio pajak dan retribusi terhadap total belanja daerah. Terlihat bahwa sumber pendapatan pajak dan retribusinya belum mampu untuk membiayai total belanja daerah Kota Kendari. Dimana hasil perhitungan DOF secara rata-rata hanya sebesar 7,09%. Ini berarti bahwa kemampuan keuangan Kota Kendari masih sangat rendah.

Dengan demikian pemerintah Kota Kendari dituntut agar lebih mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerahnya, terutama pada sektor pajak dan retribusi, dengan melakukan upaya-upaya intensifikasi objek pajak dan retribusi yang potensial. Perlu juga adanya kejelasan payung hukum menyangkut objek pajak, tarif pajak dan hal-hal yang sehubungan dengan pemungutan pajak dan retribusi. Sehingga ada kejelasan masyarakat untuk tidak ragu lagi membayar pajak dan retribusinya.

Selain itu, pemerintah Kota Kendari juga harus mampu menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor guna menanamkan modalnya di Kota Kendari, sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya PDRB. Jika PDRB meningkat, maka pendapatan perkapita masyarakat meningkat dan akhirnya berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.

Rasio Efektifitas

Dari hasil analisis Rasio efektifitas Kota Kendari dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2014 secara rata-rata rasio efektifitasnya hanya mencapai 79%. Dengan demikian kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam merealisasikan PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya masih belum efektif. Pemerintah Kota Kendari belum mampu merealisasikan sepenuhnya target PAD yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Penetapan target penerimaan oleh pemerintah Kota Kendari seharusnya memperhatikan kemampuan dan potensi keuangan daerah nya sehingga penetapan target menjadi lebih realistis dan bukan hanya menjadi tujuan semata. Penetapan target juga harus mengacu pada target-target sebelumnya sehingga tidak ada lompatan target yang terlalu tinggi, seperti yang terjadi pada penetapan target pendapatan asli daerah Kota Kendari tahun 2014 yang mencapai 292 Miliar Rupiah. Penetapan target yang sangat tinggi seperti ini akan sulit untuk direalisasikan oleh pemerintah Kota Kendari, yakni efektifitasnya hanya 25%.

Rasio Kemandirian

Setelah menganalisis Rasio Kemandirian Kota Kendari tahun 2009 sampai dengan 2014, dengan membandingkan antara rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Sumber dana eksternal atau Bantuan Pusat/prov dan pinjaman dalam bentuk Dana Perimbangan. Ditemukan bahwa total pendapatan daerah Kota Kendari masih tergantung oleh dana yang berasal dari pemerintah pusat/prov. Dimana hasil perhitungan Rasio Kemandirian secara rata-rata hanya sebesar 11,09%. Ini berarti bahwa kemampuan keuangan Kota Kendari Masih Sangat Rendah dan memiliki pola hubungan Instruktif dengan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Bank dunia tentang kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, dimana daerah otonomi dapat dikatakan mampu dan mandiri ketika kontribusi PAD terhadap total APBD mencapai minimal 20% dari total APBD.

Untuk bisa mengatasi hal tersebut dan menjadi daerah yang memiliki kemandirian, Kota Kendari harus mampu membiayai kegiatan pemerintahannya tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat/prov. Pemerintah Kota Kendari harus lebih mampu lagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, baik dari sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai DOF, Rasio Efektifitas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kendari periode 2009-2014 maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Kendari dalam pelaksanaan otonomi daerah masih "sangat kurang" (7,09%). Sehingga belum mampu membiayai semua kegiatan pemerintahannya. Kemampuan Keuangan daerah Pemerintah Kota Kendari dalam merealisasikan PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya, "Masih Belum Efektif" (secara rata-rata hanya sebesar 92%). Rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun terakhir yang menghasilkan jumlah rata-ratanya sebesar 14% (kemampuan masih rendah sekali) dengan pola hubungan yang instruktif. Artinya bahwa, masih besarnya ketergantungan pemerintah Kota Kendari terhadap sumber dana bantuan dari pihak ekstern, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, dengan komponen bantuan terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan simpulan serta keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat dipertimbangkan. Saran yang diberikan diharapkan dapat berguna dan juga dapat digunakan untuk penelitian berikutnya yaitu: Upaya pengoptimalan intensifikasi sumber-sumber Pajak daerah yang potensial, seperti pajak hotel, hiburan dan reklame, masih sangat diperlukan

serta perlu adanya kejelasan payung hukum menyangkut objek pajak, tarif pajak dan hal-hal yang sehubungan dengan pemungutan pajak lainnya. Sehingga ada kejelasan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya. dalam rangka mewujudkan eksistensi Kemampuan keuangan daerah Kota Kendari. Dalam penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Kendari sebaiknya melihat kemampuan keuangan dan potensi penerimaannya. Agar target yang ditetapkan mampu untuk direalisasikan. Untuk bisa menjadi daerah yang mandiri dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat/prov pemerintah Kota Kendari harus bisa lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD yang ada. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga akan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Alfian Mujiwardhani. 2008. "Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan Daerah)". (Skripsi) FE UNS Surakarta. Tidak dipublikasikan.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Kendari Dalam Angka 2014. Kendari: Badan Pusat Statistik Kota Kendari.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari. 2015. Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2015. Kendari: BAPPEDA Kota Kendari.
- Kaho, JR. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.